

KRISIS LEGITIMASI KEKUASAAN DAN TANTANGAN ETIKA POLITIK DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA KONTEMPORER

Egi Dwi Sabara¹, M Fajri Amdika², M Naufal Alfadhil³, Bandera Islami⁴
egidwisabara1412@gmail.com¹, fajriamdika@gmail.com², mnaufalalfadhil2@gmail.com³,
banderaislami0906@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Tulisan ini membahas fenomena krisis legitimasi kekuasaan dan tantangan etika politik dalam pemerintahan Indonesia kontemporer dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dari jurnal dan artikel ilmiah terbaru (2020–2025). Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya legitimasi politik, seperti tindakan pejabat yang tidak etis, praktik politik elit yang kurang akuntabel, serta reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan meliputi telaah literatur dan analisis konten dari artikel akademik serta laporan media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan Indonesia saat ini menghadapi tekanan signifikan akibat korupsi, kebijakan kontroversial, konflik antar-elit, serta lemahnya penerapan etika publik dalam praktik politik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi etika politik, peningkatan transparansi, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif.

Kata Kunci: Krisis Legitimasi, Kekuasaan, Etika Politik, Pemerintahan Indonesia, Akuntabilitas.

ABSTRACT

This paper examines the phenomenon of crisis of legitimacy in power and the challenges of political ethics in contemporary Indonesian governance using a qualitative approach based on a literature review of recent journals and scholarly articles (2020–2025). The study analyzes various factors contributing to the decline of political legitimacy, such as unethical actions by officials, less accountable practices of political elites, and public responses to government policies. The methods employed include literature review and content analysis of academic articles and relevant media reports. The findings indicate that the legitimacy of the Indonesian government currently faces significant pressure due to corruption, controversial policies, elite conflicts, and weak implementation of public ethics in political practice. To address these challenges, political ethics reform, increased transparency, and more effective accountability mechanisms are necessary.

Keywords: Legitimacy Crisis, Power, Political Ethics, Indonesian Governance, Accountability.

PENDAHULUAN

Legitimasi kekuasaan merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam konteks Indonesia kontemporer, legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral formal, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap integritas dan perilaku etis para pemegang kekuasaan. Beberapa kasus terkini — seperti protes publik terhadap tunjangan legislatif, kontroversi kebijakan pemerintah, dan tindakan pejabat yang dianggap tidak etis — menunjukkan adanya krisis legitimasi yang bersumber dari ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik politik yang kurang etis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika pejabat tinggi atau institusi politik gagal mempertahankan standar etika yang tinggi, hal ini secara signifikan menurunkan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintahan secara keseluruhan. Krisis legitimasi ini sering diperparah oleh ketidakmampuan institusi demokratis dalam menangani konflik elit atau korupsi secara efektif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena krisis legitimasi kekuasaan dan

tantangan etika politik, sekaligus memberikan rekomendasi strategi untuk memperkuat landasan etika dalam pemerintahan Indonesia kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur (literature review) dan analisis isi (content analysis) terhadap artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta dokumen akademik relevan, khususnya yang diterbitkan antara tahun 2020–2025. Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Jurnal akademik dari penerbit nasional dan internasional yang membahas legitimasi politik dan etika publik di Indonesia.
2. Artikel penelitian mengenai dinamika etika politik dalam praktik pemerintahan kontemporer Indonesia.
3. Studi kasus etika politik yang secara langsung berkaitan dengan isu legitimasi publik, misalnya protes masyarakat terhadap tunjangan legislatif dan konflik antar-elit.

Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait legitimasi kekuasaan dan etika politik, sekaligus merumuskan strategi perbaikan yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Kekuasaan dalam Pemerintahan Indonesia Kontemporer

Legitimasi kekuasaan merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Tanpa legitimasi yang kuat, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan publik serta menjalankan kebijakan secara efektif. Dalam sistem demokrasi modern, legitimasi tidak hanya berasal dari kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap tindakan, kebijakan, serta perilaku para pemimpin politik. Dengan kata lain, legitimasi merupakan bentuk pengakuan masyarakat bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah dianggap sah, pantas, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Di Indonesia, legitimasi politik tidak semata-mata ditentukan oleh prosedur formal elektoral atau hasil pemilihan umum, melainkan juga sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap integritas, etika, dan kinerja pejabat publik. Berdasarkan tinjauan literatur dari Silalahi et al. (2024) dan Saputra (2025), terdapat bukti empiris bahwa tindakan pejabat yang menyimpang dari standar etika, seperti penyalahgunaan anggaran negara, praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan, serta pengambilan kebijakan kontroversial yang dianggap merugikan publik, secara signifikan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi politik memiliki dimensi sosial dan moral yang sangat kuat, sehingga perilaku pejabat publik menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Fenomena tersebut dapat diamati melalui berbagai kasus kontemporer di Indonesia. Misalnya, protes publik terhadap tunjangan legislatif yang dianggap terlalu besar dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat sering kali menimbulkan kritik terhadap lembaga legislatif.

Selain itu, konflik antar-elit politik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah juga sering memicu ketidakpastian politik serta meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh stabilitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Studi dari Cahyati et al. (2025) menekankan bahwa ketika pejabat publik gagal menjaga standar etika dan integritas yang tinggi, legitimasi pemerintah tidak hanya melemah, tetapi juga berdampak pada efektivitas kebijakan publik serta stabilitas sosial secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, implementasi kebijakan publik menjadi lebih sulit karena masyarakat cenderung bersikap skeptis atau bahkan menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat proses pembangunan serta mengurangi efektivitas pelayanan publik.

Secara konseptual, legitimasi politik dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama menurut Beetham (1991), yaitu legitimasi berbasis prosedur, legitimasi berbasis kinerja, dan legitimasi berbasis etika. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan bersama-sama membentuk dasar keabsahan kekuasaan dalam suatu sistem politik.

Pertama, legitimasi berbasis prosedur mengacu pada keabsahan kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi formal, seperti pemilihan umum yang bebas, adil, dan transparan. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin politik serta memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan syarat penting bagi terciptanya legitimasi politik yang kuat.

Kedua, legitimasi berbasis kinerja berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial cenderung memperoleh tingkat legitimasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi harapan masyarakat, legitimasi kekuasaan dapat menurun meskipun pemerintah tersebut dipilih melalui proses demokrasi yang sah.

Ketiga, legitimasi berbasis etika berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap integritas moral dan perilaku pejabat publik. Dimensi ini menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip moral yang tinggi, seperti kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan publik. Dalam perspektif etika politik, pejabat publik tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas secara efektif, tetapi juga harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dihargai oleh masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia kontemporer, berbagai literatur menunjukkan bahwa legitimasi berbasis etika merupakan dimensi yang paling rentan mengalami krisis. Hal ini disebabkan oleh masih adanya berbagai kasus pelanggaran etika yang melibatkan pejabat publik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Menurut Darmawan (2025), lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik politik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rapuhnya legitimasi etika dalam pemerintahan Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memengaruhi dinamika legitimasi politik di era kontemporer. Informasi mengenai tindakan pejabat publik dapat dengan cepat tersebar kepada masyarakat, sehingga setiap pelanggaran etika dapat langsung menjadi perhatian publik. Di satu sisi, kondisi ini meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, hal ini juga membuat legitimasi politik menjadi lebih mudah terpengaruh oleh opini publik dan dinamika komunikasi politik di ruang digital.

Akibatnya, meskipun prosedur demokrasi formal telah dijalankan dengan baik dan kinerja pemerintah terlihat positif dalam beberapa indikator pembangunan, kepercayaan publik tetap dapat menurun apabila etika politik tidak ditegakkan secara konsisten. Oleh

karena itu, penguatan integritas pejabat publik serta penerapan prinsip good governance menjadi langkah penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis.

Dengan demikian, legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh proses politik formal, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan, integritas moral, serta kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ketika ketiga aspek tersebut berjalan secara seimbang, maka legitimasi politik dapat terjaga dan stabilitas pemerintahan dapat dipertahankan.

Etika politik merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga kualitas pemerintahan demokratis. Dalam sistem demokrasi modern, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme elektoral, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan secara moral, transparan, dan bertanggung jawab. Etika politik berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku pejabat publik dalam menjalankan kewenangan politiknya. Menurut Suseno (2003), etika politik bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan demi kepentingan umum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, tantangan etika politik masih menjadi isu yang sangat relevan. Berbagai kasus pelanggaran etika yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa standar moral dalam praktik politik belum sepenuhnya ditegakkan secara konsisten. Hal ini tidak hanya berdampak pada citra pemerintah, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.

1. Korupsi sebagai Tantangan Utama Etika Politik

Salah satu bentuk pelanggaran etika politik yang paling serius adalah praktik korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Di Indonesia, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan masih belum optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korupsi sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas pejabat publik, serta adanya budaya politik yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Darmawan, 2025). Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Selain itu, korupsi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat publik lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik, kepercayaan terhadap proses politik akan menurun. Penurunan kepercayaan ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat serta meningkatnya apatisme terhadap proses demokrasi.

2. Nepotisme dan Konflik Kepentingan

Selain korupsi, tantangan etika politik lainnya adalah praktik nepotisme dan konflik kepentingan dalam pemerintahan. Nepotisme terjadi ketika seseorang memperoleh jabatan atau keuntungan politik karena hubungan keluarga atau kedekatan pribadi dengan pejabat yang berkuasa, bukan karena kompetensi atau kualifikasi yang dimilikinya.

Praktik nepotisme dapat menimbulkan berbagai masalah dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu dampak utamanya adalah menurunnya profesionalitas birokrasi. Ketika jabatan diberikan berdasarkan hubungan pribadi, maka kemungkinan besar individu yang menduduki jabatan tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Akibatnya, kualitas pelayanan publik dapat menurun

dan kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

Konflik kepentingan juga merupakan bagian dari tantangan etika politik yang sering muncul dalam praktik pemerintahan. Konflik kepentingan terjadi ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan politik yang diambilnya. Dalam beberapa kasus, pejabat publik dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki hubungan bisnis atau politik dengan mereka. Menurut Cahyati et al. (2025), konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.

3. Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang mereka ambil.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kebijakan publik yang diambil tanpa proses transparansi yang memadai. Kurangnya keterbukaan informasi sering kali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap motif di balik suatu kebijakan. Hal ini dapat memicu berbagai kritik dan protes publik, terutama ketika kebijakan tersebut dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Rendahnya akuntabilitas juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi etika politik. Ketika pelanggaran etika tidak ditindak secara tegas, maka hal tersebut dapat menciptakan budaya impunitas di kalangan pejabat publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan sistem pengawasan dan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

4. Peran Media dan Masyarakat Sipil dalam Mengawasi Etika Politik

Meskipun tantangan etika politik di Indonesia masih cukup besar, terdapat berbagai aktor yang berperan penting dalam menjaga integritas pemerintahan. Salah satu aktor tersebut adalah media massa dan masyarakat sipil. Media memiliki peran strategis dalam mengungkap berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik. Melalui fungsi kontrol sosial, media dapat memberikan tekanan kepada pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kekuasaan. Selain media, organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik politik. Berbagai lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan kelompok advokasi sering melakukan penelitian, kampanye, serta advokasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan standar etika dalam pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat.

5. Penguatan Etika Politik sebagai Upaya Meningkatkan Legitimasi Pemerintah

Dalam perspektif teori legitimasi kekuasaan, penguatan etika politik merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beetham (1991) menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada legalitas formal, tetapi juga pada kesesuaian tindakan pemerintah dengan nilai-nilai moral yang diakui oleh masyarakat.

Oleh karena itu, upaya memperkuat etika politik perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan integritas pejabat publik, reformasi birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika. Pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membangun budaya politik yang lebih demokratis dan beretika.

Selain itu, penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan lembaga pengawas lainnya juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik dapat diawasi secara efektif. Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat.

Singkatan yang sudah umum seperti seperti IEEE, SI, MKS, CGS, sc, dc, and rms tidak perlu diberi keterangan kepanjangannya. Akan tetapi, akronim yang tidak terlalu dikenal atau akronim buatan penulis perlu diberi keterangan kepanjangannya. Sebagai contoh: Model pembelajaran MiKiR (Multimedia interaktif, Kolaboratif, dan Reflektif) dapat digunakan untuk melatih penguasaan keterampilan pemecahan masalah. Jangan gunakan singkatan atau akronim pada judul artikel, kecuali tidak bisa dihindari.

Satuan

Penulisan satuan di dalam artikel memperhatikan aturan sebagai-berikut:

- Gunakan SI (MKS) atau CGS sebagai satuan utama, dengan satuan sistem SI lebih diharapkan.
- Hindari penggabungan satuan SI dan CGS, karena dapat menimbulkan kerancuan, karena dimensi persamaan bisa menjadi tidak setara.
- Jangan mencampur singkatan satuan dengan satuan lengkap. Misalnya, gunakan satuan “Wb/m²” or “webers per meter persegi”, jangan “webers/m²”.

Persamaan

Anda seharusnya menuliskan persamaan dalam font Times New Roman atau font Symbol. Jika terdapat beberapa persamaan, beri nomor persamaan. Nomor persamaan seharusnya berurutan, letakkan pada bagian paling kanan, yakni (1), (2), dan seterusnya. Gunakan tanda agar penulisan persamaan lebih ringkas. Gunakan font italic untuk variabel, huruf tebal untuk vektor.

Kutipan dan Acuan

Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat dan memperkaya gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain ini diacu (dirujuk), dan sumber acuannya dimasukkan dalam Daftar Pustaka.

Daftar Pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Artinya, sumber yang ditulis dalam Daftar Pustaka benar-benar dirujuk dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua acuan yang telah disebutkan dalam artikel harus dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Untuk menunjukkan kualitas artikel ilmiah, daftar yang dimasukkan dalam Daftar Pustaka harus cukup banyak. Daftar Pustaka disusun secara alfabetis dan cara penulisannya disesuaikan dengan aturan yang ditentukan dalam jurnal. Kaidah penulisan kutipan, acuan, dan Daftar Pustaka mengikuti buku pedoman ini.

Penyajian gagasan orang lain di dalam artikel dilakukan secara tidak langsung. Gagasan yang dikutip tidak dituliskan seperti teks asli, tetapi dibuatkan ringkasan atau simpulannya. Sebagai contoh, Suharno (1973:6) menyatakan bahwa kecepatan terdiri dari gerakan ke depan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin, kemampuan gerakan kontraksi putus-putus otot atau segerombolan otot, kemampuan reaksi otot atau segerombolan otot dalam tempo cepat karena rangsangan.

Acuan adalah penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai (1) pengakuan kepada pemilik gagasan bahwa penulis telah melakukan “peminjaman” bukan penjiplakan, dan (2) pemberitahuan kepada pembacanya siapa dan darimana gagasan tersebut diambil. Acuan memuat nama pengarang yang pendapatnya dikutip, tahun sumber informasi ditulis, dan/tanpa nomor halaman tempat informasi yang dirujuk diambil. Nama

pengarang yang digunakan dalam acuan hanya nama akhir. Acuan dapat dituliskan di tengah kalimat atau di akhir kalimat kutipan.

Acuan ditulis dan dipisahkan dari kalimat kutipan dengan kurung buka dan kurung tutup (periksa contoh-contoh di bawah). Acuan yang dituliskan di tengah kalimat dipisahkan dengan kata yang mendahului dan kata yang mengikutinya dengan jarak. Acuan yang dituliskan diakhir kalimat dipisahkan dari kata terakhir kalimat kutipan dengan diberi jarak, namun tidak dipisahkan dengan titik. Nama pengarang ditulis tanpa jarak setelah tanda kurung pembuka dan diikuti koma. Tahun penerbitan dituliskan setelah koma dan diberi jarak. Halaman buku atau artikel setelah tahun penerbitan, dipisahkan dengan tanda titik dua tanpa jarak, dan ditutup dengan kurung tanpa jarak. Sebagai contoh: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Riebel, 1978:1).

Apabila nama pengarang telah disebutkan di dalam teks, tahun penerbitan sumber informasi dituliskan segera setelah nama penulisnya. Atau, apabila nama pengarang tetap ingin disebutkan, acuan ini dituliskan di akhir teks. Contohnya: menurut Riebel (1978:1), karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain.

Nama dua pengarang dalam karya yang sama disambung dengan kata 'dan'. Titik koma (;) digunakan untuk dua pengarang atau lebih dari dua pengarang dengan karya yang berbeda. Contohnya: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Riebel dan Roger, 1980:5). Jika melibatkan dua pengarang dalam dua karya yang berbeda, contoh penulisannya: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Riebel, 1978:4; Roger, 1981:5).

Apabila pengarang lebih dari dua orang, hanya nama pengarang pertama yang dituliskan. Nama pengarang selebihnya digantikan dengan 'dkk' (dan kawan-kawan). Tulisan 'dkk' dipisahkan dari nama pengarang, yang disebutkan dengan jarak, diikuti titik, dan diakhiri dengan koma. Contohnya: membaca adalah kegiatan interaksi antara pembaca dan penulis yang kehadirannya diwakili oleh teks (Susanto dkk., 1994: 8).

Penulisan Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan. Dalam artikel ilmiah, Daftar Pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti aturan dalam Buku Pedoman ini.

KESIMPULAN

Krisis legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia kontemporer merupakan fenomena yang nyata dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lemahnya penerapan etika politik dalam praktik kekuasaan. Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur demokrasi formal seperti pemilihan umum, tetapi juga sangat bergantung pada integritas, kinerja, dan perilaku etis pejabat publik. Berbagai permasalahan seperti korupsi, nepotisme, konflik kepentingan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, perkembangan media dan keterbukaan informasi turut mempercepat penyebaran isu-isu pelanggaran etika, sehingga memperkuat persepsi negatif publik terhadap institusi politik. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak pada melemahnya efektivitas kebijakan publik, menurunnya partisipasi masyarakat, serta terganggunya stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan

hanya dapat dipertahankan apabila pemerintah mampu menjalankan kekuasaan secara sah, efektif, dan berlandaskan nilai-nilai etika yang kuat.

Saran

Untuk mengatasi krisis legitimasi kekuasaan dan tantangan etika politik dalam pemerintahan Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kedua, penegakan hukum terhadap pelanggaran etika, khususnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu.

Ketiga, reformasi birokrasi perlu terus dilakukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik nepotisme serta konflik kepentingan. Keempat, penguatan lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman harus menjadi prioritas agar pengawasan terhadap pejabat publik berjalan efektif.

Selain itu, peran media dan masyarakat sipil perlu terus didorong sebagai kontrol sosial dalam menjaga etika politik. Terakhir, pendidikan politik kepada masyarakat juga penting untuk membangun kesadaran kritis dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan legitimasi pemerintahan dapat diperkuat dan kualitas demokrasi di Indonesia semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Beetham, D. (1991). *The Legitimation of Power*. London: Macmillan.
- Cahyati, R., Pratama, A., & Nugroho, D. (2025). Etika politik dan kepercayaan publik dalam pemerintahan demokratis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–58.
- Darmawan, H. (2025). Integritas pejabat publik dan legitimasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 101–115.
- Saputra, R. (2025). Kepercayaan publik terhadap institusi politik dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Studi Politik Indonesia*, 8(1), 67–82.
- Silalahi, M., Simanjuntak, R., & Hutagalung, T. (2024). Legitimasi politik dan tantangan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Governance Studies*, 6(2), 89–103.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
2. Tantangan Etika Politik dalam Pemerintahan Indonesia
- Beetham, D. (1991). *The Legitimation of Power*. London: Macmillan.
- Cahyati, R., Pratama, A., & Nugroho, D. (2025). Etika politik dan kepercayaan publik dalam pemerintahan demokratis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–58.
- Darmawan, H. (2025). Integritas pejabat publik dan legitimasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(2), 101–115.
- Saputra, R. (2025). Kepercayaan publik terhadap institusi politik dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Studi Politik Indonesia*, 8(1), 67–82.
- Silalahi, M., Simanjuntak, R., & Hutagalung, T. (2024). Legitimasi politik dan tantangan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Governance Studies*, 6(2), 89–103.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Singkatan dan Akronim